

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN, KEUANGAN DAN ASET (DPPKA) KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

Oleh:

Oldison Santosa¹**Jantje J. Tinangon²****Inggriani Elim³**^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi

Universitas Sam Ratulangi Manado

email: ¹oldisantosa@yahoo.com² tjantjejanny@yahoo.com³ e_inggriani@yahoo.com**ABSTRAK**

Pemerintah daerah dalam menganalisis keuangan negara adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan. Rasio keuangan ini selanjutnya digunakan sebagai tolak ukur untuk mengukur efektifitas dalam merealisasikan pendapatan asli daerah, menilai kemandirian keuangan pemerintah daerah, mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan dari pajak daerah serta mengukur kinerja keuangan dari pertumbuhan pendapatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan kinerja keuangan pada DPPKA Kabupaten Kepulauan Sangihe. Penelitian ini dilakukan di kantor DPPKA Kabupaten kepulauan sangihe. Data yang digunakan adalah kuantitatif berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif untuk mengukur kinerja keuangan dengan rasio dan analisis keuangan. Hasil Penelitian menunjukkan, Rasio efektivitas PAD jika dilihat dari kinerja keuangan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun walaupun tidak berjalan secara efektif, untuk rasio kemandirian dapat dikatakan rendah sekali, hal ini menggambarkan ketergantungan daerah terhadap pusat sangat tinggi, pada rasio pajak daerah terhadap PAD menurun dari tahun sebelumnya ini disebabkan karena masi kurangnya wajib pajak dalam membayar pajak, untuk analisis pertumbuhan mengalami peningkatan dan penurunan walupun tidak signifikan. Sebaiknya pemerintah daerah mencari alternatif usaha meningkatkan PAD seperti program kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta dan juga program peningkatan BUMD sektor potensial.

Kata kunci: analisis kinerja keuangan, rasio keuangan

ABSTRAK

Local governments in analyzing the financial state is to perform financial ratio analysis. Financial ratios are then used as a benchmark to measure the effectiveness in the realization of income, financial independence of local governments assess, measure the ability of local governments to generate revenue from local taxes as well as measuring the financial performance of the revenue growth. This study aimed to determine the ability of the financial performance of DPPKA Sangihe Islands. This research was conducted at the office of the District DPPKA Sangihe archipelago. The data used is a quantitative form Realized Budget Report (LRA). The method used is descriptive quantitative to measure the financial performance ratios and financial analysis. Research results show, PAD effectiveness ratios when viewed from the financial performance has increased from year to year, although not operating effectively, it can be said for independence ratio is very low, this illustrates the dependence of the central area is very high, the ratio of the local tax revenue decreased from earlier this year due to lack of infor- taxpayer in paying taxes, for analisis growth have increased and decreased even though not significant. Local governments should look for alternatives such as a program to increase local revenue financing cooperation with the private sector and also a potential sector-owned improvement program

Keywords: analysis of the financial performance, financial ratios

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Otonomi Daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa dan bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah sendiri. Tujuan otonomi daerah adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antara daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik di daerah masing-masing. Pengelolaan keuangan daerah menuntut akuntabilitas dan transparansi yang semakin besar dengan tetap memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan. Prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah mutlak diperlukan guna menjamin tidak terjadinya penyimpangan yang justru merugikan masyarakat. Untuk memastikan hal tersebut, diharapkan aturan dan ketentuan pelaksanaan dan pengelolaan keuangan daerah semakin sempurna dan disajikan secara detail, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Kinerja merupakan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam strategis planing suatu organisasi. Sedangkan untuk Pengukuran kinerja Pemerintah Daerah harus mencakup pengukuran kinerja keuangan dan non keuangan. Indikator Kinerja Pemerintah Daerah, meliputi indikator input, indikator proses, indikator output, indikator outcome, indikator benefit dan indikator impact.

Menganalisis kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan negara adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan. Analisis rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio efektivitas PAD, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio pajak daerah terhadap PAD, dan analisis pertumbuhan. Hasil analisis rasio keuangan ini selanjutnya digunakan sebagai tolak ukur untuk mengukur efektivitas dalam merealisasikan pendapatan asli daerah, menilai kemandirian keuangan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan negara, mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan dari pajak daerah serta mengukur sejauh mana kinerja keuangan dari pertumbuhan pendapatan dan belanja tiap tahunnya.

Pemerintah daerah dalam menganalisis Kinerja keuangan menjadi poin penting serta topik yang menarik untuk diteliti. Hal ini dikarenakan, dengan meneliti kinerja keuangan pemerintah dapat diketahui hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, apakah pemerintah tersebut sudah baik menjalankan tugas dan fungsinya sesuai yang diamanatkan oleh rakyatnya untuk mencapai kesejahteraan. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengukur Kinerja Keuangan Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang jujur, demokratis, efektif, efisien, ekonomis dan akuntabel, analisis rasio keuangan terhadap pendapatan dan belanja daerah perlu dilaksanakan.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kemampuan kinerja keuangan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kepulauan Sangihe.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Akuntansi Sektor Publik

Mursyidi (2009:1) menyatakan bahwa akuntansi pemerintahan adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat dilembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya. Nordiawan dan Ayuningtyas (2010:4) menyatakan bahwa akuntansi sektor publik adalah sebuah entitas ekonomi yang menyediakan barang dan/atau jasa publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bukan untuk mencari keuntungan finansial.

Standar Akuntansi Sektor Publik

Mahsun, dkk (2006:65) menyatakan akuntansi sektor publik adalah prinsip – prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan organisasi sektor publik. Pemerintah sudah menerapkan standar akuntansi untuk pemerintah yang disebut standar akuntansi pemerintahan (SAP). Standar akuntansi ini dinyatakan dalam bentuk pernyataan standar Akuntansi Sektor Publik yang memuat tentang elemen- elemen standar akuntansi (PSA).

Laporan Keuangan Sektor Publik

Nordiawan dan Ayuningtyas (2010:125) menyatakan Laporan keuangan dalam lingkungan sektor publik berperan penting dalam menciptakan akuntabilitas sektor publik. Semakin besarnya tuntutan terhadap pelaksanaan akuntabilitas sektor publik memperbesar kebutuhan akan transparansi informasi keuangan sektor publik. Informasi keuangan ini berfungsi sebagai dasar pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Akuntansi sektor publik berperan penting dalam menyiapkan laporan keuangan sebagai perwujudan akuntabilitas publik. Pada umumnya, beberapa laporan keuangan terdiri dari :

1. Neraca atau Laporan Posisi Keuangan.
2. Laporan Operasi atau Laporan Aktivitas atau Laporan Realisasi Anggaran.
3. Laporan Arus Kas.
4. Laporan Perubahan Ekuitas.
5. Catatan atas Laporan Keuangan.

Analisis Rasio-Rasio Keuangan Daerah

Syukriy (2011) menyatakan Sudah menjadi sebuah kelaziman bahwa untuk menilai kinerja keuangan dibuat rasio-rasio, yang merupakan perbandingan antara angka-angka tertentu dalam laporan keuangan dikalikan 100%. Hal ini menunjukkan nilai relatif atau proporsi di antara dua angka yang dipakai, yang diasumsikan memiliki hubungan, baik secara langsung ataupun tidak langsung, yang bersumber dari laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Apabila angka-angka yang tersaji dalam LKPD bukanlah yang sesungguhnya, maka informasi yang terkandung dalam rasio-rasio keuangan yang dianalisis untuk menilai kinerja keuangan Pemda menjadi kurang tepat.

Kinerja

Bastian (2006:274) menyatakan Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perencanaan strategis suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya.

Manajemen Kinerja

Chairilfur (2012) menyatakan Secara teoritis, manajemen kinerja juga bisa didefinisikan sebagai proses sistematis, terencana dan berkelanjutan yang meliputi perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja, penilaian kinerja, kaji ulang kinerja, dan perbaikan kinerja. Manajemen kinerja merupakan proses penentuan indikator kinerja yang tepat untuk suatu kegiatan serta pengukuran indikator kinerja dari pelaksanaan kegiatan sehingga dapat digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan suatu organisasi pemerintahan.

Analisis Kinerja Keuangan Daerah

Pasal 4 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Pemerintah, menegaskan bahwa salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melaksanakan analisis rasio terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Hasil rasio keuangan ini selanjutnya digunakan untuk tolak ukur dalam:

1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
2. Mengukur efektifitas dalam merealisasikan pendapatan daerah. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
3. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
4. Melihat pertumbuhan dan perkembangan dan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Rasio Keuangan sebagai Pengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Mahmudi (2010:142) menyatakan, analisis rasio keuangan terdiri dari:

1. **Rasio Efektivitas PAD**

$$\text{Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. **Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

$$\text{Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat \& Propinsi}} \times 100$$

3. **Rasio Pajak Daerah Terhadap PAD**

$$\text{Pajak daerah terhadap PAD} = \frac{\text{Pajak Daerah}}{\text{PAD}} \times 100\%$$

4. **Analisis Pertumbuhan**

$$\text{Analisis Pertumbuhan} = \frac{\text{RpXn} - \text{Xn-1}}{\text{RpXn-1}} \times 100\%$$

Penelitian Terdahulu

1. Saragai (2013) dengan judul *Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja kabupaten Minahasa Selatan*. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis kinerja pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dalam mengolah anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk tahun anggaran 2009-2011. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan kinerja pemerintah kabupaten Minahasa Selatan dalam mengolah pendapatannya belum baik. Ini dilihat dari varians pendapatan yang menunjukkan belum adanya realisasi pendapatan yang mencapai target. Kinerja pemerintah dalam mengolah anggaran belanja sudah cukup baik, ini dilihat dari tidak adanya realisasi belanja yang melebihi dari yang dianggarkan.
2. Kalalo (2014) dengan judul *Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Manado*. Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui kinerja keuangan pada Pemerintah kota manado tahun anggaran 2010 -2012. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian yang didapat adalah kinerja keuangan Pemerintah Kota Manado tahun 2010-2012 dinilai baik walaupun persentasinya masi cukup rendah, namun dilihat dari PAD yang terus meningkat setiap tahunnya meskipun tidak signifikan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan studi kasus yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari objek penelitian. Kegiatan ini dilakukan dengan mengawasi dan mempelajari secara langsung kinerja keuangan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset kabupaten kepulauan sangihe.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukandiDinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten kepulauan Sangihe dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni 2014.

Prosedur Penelitian

Prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

1. Mengidentifikasi latar belakang masalah dalam penelitian ini.
2. Merumuskan masalah dalam penelitian ini.
3. Mencari literatur-literatur yang terkait dalam penelitian ini.
4. Mengumpulkan data-data yang terkait dalam penelitian ini pada DPPKA Kabupaten Kepulauan Sangihe.
5. Menganalisis Kinerja Keuangan di DPPKA Kabupaten Kepulauan Sangihe.
6. Menarik Kesimpulan dan memberikan saran berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini.

Metode Pengumpulan Data

Jenis Data

Sugiyono (2008:23) menyatakan jenis data dapat dibedakan menjadi :

1. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kalimat, kata, atau gambar.
2. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka, atau data kualitatif yang diangkakan (*scoring*).
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa Laporan Realisasi Anggaran.

Sumber Data

Kuncoro (2009:148) menyatakan sumber penelitian dibagi menjadi dua hal yaitu:

1. Data primer adalah data yang diperoleh dari survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original.
2. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa gambaran umum kabupaten kepulauan sangihe, daftar SKPD di kabupaten Kepulauan Sangihe, gambaran umum organisasi, Laporan Keuangan T.A 2010, T.A 2011, T.A 2012 dan sampel nota kredit sebagai bukti transaksi penerimaan dana transfer.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teknik Wawancara
Teknik ini dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada staf dan pimpinan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini.
2. Teknik Dokumentasi
Teknik ini dilakukan dengan cara mendapatkan informasi dari buku- buku, literatur, majalah, jurnal, serta bahan-bahan informasi lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan untuk menganalisa hasil penelitian ini adalah dengan analisis deskriptif, dengan melalui rasio dan analisis perbandingan.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Memperoleh gambaran umum dari objek penelitian.
3. Mempelajari data yang diterima dari objek penelitian.
4. Mengolah data yang diterima dari objek penelitian.
5. Membandingkan hasil yang diperoleh dengan teori yang ada.
6. Menarik kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan saran-saran yang dianggap perlu.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**Hasil Penelitian**

Data yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2010, 2011, 2012, dan 2013. Di dalam Laporan realisasi Anggaran terdiri atas Pendapatan daerah, belanja daerah dan Pembiayaan daerah, namun dalam LRA yang digunakan hanyalah pendapatan daerah. Untuk Mengukur kinerja keuangan tersebut digunakan penghitungan rasio keuangan.

Tabel 1. Realisasi PAD, Target PAD, Pendapatan Transfer, Realisasi Pendapatan Pajak Daerah.

Tahun	2010	2011	2012	2013
Realisasi PAD	23,768,305,701.87	28,506,013,460.69	27,988,410,577.75	32,165,776,372.39
Target PAD	29,704,192,095.00	29,397,292,263.00	30,468,830,988.00	34,620,154,464.48
Pendapatan Transfer	360,005,170,206.00	395,411,976,699.00	465,896,657,578	533,458,451,036
Realisasi PPD	3,051,231,381.00	3,624,361,654.00	3,343,960,831.00	3,384,920,368.00

Sumber: DPPKA Sangihe, 2014

Tabel 1 menunjukan realisasi pendapatan asli daerah tahun 2010 – 2013 mengalami peningkatan dan penurunan, pada tahun 2010 pendapatan asli daerah sebesar 23,768,305,701.87 dan pada tahun 2011 mengalami kenaikan mencapai 28,506,013,460.69 dan pada tahun 2012 malahan mengalami penurunan menjadi 27,988,410,577.75, kemudian pada tahun 2013 mengalami kenaikan yang tidak signifikan mencapai 32,165,776,372.39.

1. Rasio Efektivitas PAD

Menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

$$\text{Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tabel 2. Hasil Perhitungan menggunakan Rasio Efektifitas PAD

Rasio Keuangan	Tahun 2010 (%)	Tahun 2011 (%)	Tahun 2012 (%)	Tahun 2013 (%)
Rasio Efektivitas PAD	80,02	96,79	91,86	92,91

Sumber: Data Olahan, 2014

Hasil perhitungan rasio efektivitas di atas di peroleh hasil tahun anggaran 2010 adalah 80.02%, tahun anggaran 2011 adalah 96.97%, tahun anggaran 2012 adalah 91.86% dan tahun aggaran 2013 adalah 92.91% menunjukkan hasil cukup efektif dan cenderung ke efektif jika dilihat dari penilaian kinerja keuangan.

2. Rasio kemandirian Keuangan Daerah

Tingkat Kemandirian Keuangan daerah adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, yang diukur dengan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat dan pinjaman.

$$\text{Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat \& Propinsi}} \times 100\%$$

Tabel 3. Hasil Perhitungan menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Keuangan	Tahun 2010 (%)	Tahun 2011 (%)	Tahun 2012 (%)	Tahun 2013 (%)
Rasio Kemandirian	6,60	7,21	6,01	6,03

Sumber: Data Olahan, 2014

Hasil perhitungan rasio. Kemandirian di atas di peroleh hasil tahun anggaran 2010 adalah 6.60%, tahun anggaran 2011 adalah 7.21%, tahun anggaran 2012 adalah 6.01% dan tahun aggaran 2013 adalah 6.03% menunjukkan hasil yang rendah sekali karena nilai yang dihasilkan antara 0% hingga 25%.

3. Rasio pajak daerah terhadap PAD

Rasio ini mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan dari pajak daerah. rasio pajak daerah terhadap PAD adalah sebagai berikut:

$$\text{Pajak daerah terhadap PAD} = \frac{\text{Pajak Daerah}}{\text{PAD}} \times 100\%$$

Tabel 4. Hasil Perhitungan menggunakan Rasio Pajak Daerah Terhadap PAD

Rasio Keuangan	Tahun 2010 (%)	Tahun 2011 (%)	Tahun 2012 (%)	Tahun 2013 (%)
Rasio pajak daerah terhdap PAD	12,84	12,71	11,95	10,52

Sumber: Data Olahan, 2014

Hasil perhitungan rasio pajak daerah di atas di peroleh hasil tahun anggaran 2010 adalah 12.84%, tahun anggaran 2011 adalah 12.71%, tahun anggaran 2012 adalah 11.95% dan tahun aggaran 2013 adalah 10.52% menunjukkan hasil kurang karena nilai yang dihasilkan antara 10.01% hingga 20.00%.

4. Analisis Pertumbuhan

Analisis pertumbuhan dimaksudkan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang dicapai dari periode ke periode berikutnya. Analisis pertumbuhan dikatakan baik, jika setiap tahunnya mengalami pertumbuhan positif atau mengalami peningkatan.

$$\text{Analisis Pertumbuhan} = \frac{\text{RpXn} - \text{Xn-1}}{\text{RpXn-1}} \times 100\%$$

Tabel 5. Hasil Perhitungan menggunakan Analisis Pertumbuhan

Analisis Keuangan	Tahun 2010 (%)	Tahun 2011 (%)	Tahun 2012 (%)	Tahun 2013 (%)
Analisis Pertumbuhan	-	19,93	-1,81	14,92

Sumber: Data Olahan, 2014

Hasil diperoleh dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2011 dikurangi dengan total Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2010 dibagi dengan total pendapatan asli daerah tahun 2010 di kali seratus persen. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan asli daerah dari tahun 2010 ke tahun 2011 hanya mencapai 19,93 %. Analisis pertumbuhan tahun 2012 dapat dikatakan kurang baik karena hasil yang di dapat yaitu -1.81% diperoleh dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2011 dikurangi dengan total Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2012 dibagi dengan total Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2011 di kali seratus persen, dengan demikian terjadi penurunan yang sangat signifikan dari tahun sebelumnya (2011). Setelah dilakukan pembagian antara realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2013 dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2012 dibagi dengan total Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2012 diperoleh hasil sebesar 14,92 %. Ini berarti bahwa terjadi pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang positif dari tahun sebelumnya dengan total 13,11%.

Pembahasan

1. Rasio efektivitas PAD selama 4 tahun pada DPPKA Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki rata-rata tingkat efektivitas cukup efektif dan cenderung ke efektif. Rasio efektivitas yang cukup efektif dan cenderung ke efektif mengakibatkan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam membiayai pelaksanaan otonomi daerahnya masih kurang. Ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah masih belum dapat diandalkan bagi daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, karena rendahnya basis pajak/ retribusi yang ada di daerah dan kurangnya pendapatan asli daerah yang dapat digali oleh pemerintah daerah. Penelitian oleh Kalalo (2014) pada Pemerintah Kota Manado menunjukkan Efektivitas PAD pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Rasio efektivitas PAD pemerintah Kota Manado mengalami peningkatan setiap tahunnya, bahkan pada tahun 2012 PAD melebihi apa yang sudah ditargetkan pemerintah Kota Manado.
2. Kemandirian terhadap kemampuan keuangan DPPKA Kabupaten Kepulauan, maka untuk tahun 2010 – 2013 dapat dikatakan rendah sekali. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana pusat dan propinsi masih sangat tinggi, meskipun kemandirian keuangan DPPKA Kabupaten Sangihe masih dikatakan rendah sekali namun untuk tahun 2013 sudah mengalami peningkatan walaupun masih sangat kecil. Penelitian yang dilakukan oleh Anastasia (2012) pada Pemerintah Kabupaten Bulukumba, untuk rasio kemandiriannya masih dikatakan rendah sekali itu berarti memiliki kesamaan dengan rasio kemandirian Kabupaten Kepulauan Sangihe.
3. Rasio pajak daerah terhadap PAD diketahui bahwa kinerja keuangan DPPKA Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2010-2013 berdasarkan kriteria rasio pajak terhadap PAD, maka kinerja keuangan DPPKA Kabupaten Kepulauan Sangihe kurang. Penelitian yang dilakukan oleh Saragai (2013) pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, kontribusi pajak daerah di Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2010 -2011 dikatakan kurang. Hal ini menunjukkan Kontribusi pajak daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe sama dengan kontribusi pajak daerah yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan bila dilihat dari kriteria rasio pajak daerah terhadap PAD.
4. Analisis pertumbuhan tahun 2010 ke tahun 2011 dengan kategori pertumbuhan yang kurang baik, artinya bahwa potensi yang ada pada sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi : pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD serta pendapatan lain-lain yang sah belum dikelola secara maksimal. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2012 terjadi penurunan pendapatan dibandingkan

dengan tahun 2011, hal ini mengakibatkan pertumbuhan pendapatan mengalami trend negatif karena hasil pendapatan tidak mengalami kenaikan malahan terjadi penurunan. Tahun 2013 lebih baik dari tahun sebelumnya dimana pada saat itu mengalami kenaikan walaupun dalam kategori kurang baik ini diakibatkan oleh pertumbuhan ekonomi masyarakat semakin membaik sehingga terjadi kesadaran masyarakat dalam membayar kewajiban sebagai wajib pajak serta membayar retribusi atas penggunaan jasa-jasa fasilitas pemerintah daerah.

Kinerja DPPKA Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam mengelola keuangannya bisa dikatakan kurang baik. Namun demikian pemerintah diharapkan lebih mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan yang ada, misalnya pada sektor laba BUMD serta pendapatan lain-lain yang sah milik pemerintah daerah dan hal ini jika di kelola dengan baik maka akan terjadi peningkatan PAD dari tahun ke tahun.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini adalah:

1. Rasio efektivitas kinerja keuangan Dinas PPKA kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan hasil cukup efektif dan cenderung ke efektif jika dilihat dari penilaian kinerja keuangan.
2. Rasio kemandirian keuangan Dinas PPKA Kabupaten Kepulauan Sangihe secara keseluruhan dikatakan rendah sekali, hal ini menggambarkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana pusat dan propinsi masi sangat tinggi.
3. Rasio pajak terhadap PAD, maka kinerja keuangan Dinas PPKA Kabupaten Kepulauan Sangihe dikatakan kurang. Hal ini dikarenakan masi sangat kurangnya wajib pajak dalam membayar pajak daerah sehingga sangat berpengaruh sumbangan pajak daerah terhadap PAD, padahal usaha yang dijalankan WP meningkat.
4. Analisis pertumbuhan tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 nampak bahwa terjadi peningkatan dan penurunan, ini menandakan masi belum stabil pertumbuhan ekonomi kabupaten kepulauan sangihe dikarenakan pendapatan masyarakat yang sebagian besar mengandalkan sumber pendapatan dari hasil bumi dan perikanan sehingga para wajib pajak membayar lebih sedikit karena hasil yang didapatkan sangat tergantung pada harga di pasaran.

Saran

Saran yang disampaikan sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah sebaiknya mencari alternatif-alternatif usaha lain meningkatkan PAD seperti program kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta dan juga program peningkatan BUMD sektor potensial.
2. Mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan yang ada, aparat pajak dan ditjen pajak seharusnya tidak boleh kecolongan terhadap orang yang lalai dalam membayar pajak, karena pajak adalah sumber utama pendapatan yang mampu meningkatkan keuangan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Anastasia Melisa. 2012. Evaluasi kinerja keuangan daerah kabupaten Bulukumba. *Skripsi*. Universitas Hasanudin. Makasar. <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/1616>. Diakses tgl 16 Oktober 2014. Hal 48-49.
- Chairilfur Andi. 2012. Pengelolaan Keuangan Daerah. *Artikel*. <http://andichairilfurqan.wordpress.com/2012/05/25/>. Diakses tgl 30 Juli 2014.
- Bastian Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- DPPKA. 2014. Laporan Realisasi Anggaran tahun 2010 – 2013.
- Kuncoro, Mudrajat. 2009. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi. Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis? Edisi 3*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Kalalo Nadya Pretti,. 2014. Pengukuran Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Manado. Universitas Sam Ratulangi. Manado. *Jurnal EMBA* ISSN 2303-1174, Vol 2. Akses tgl 16 Oktober 2014. Hal 1174.
- Mahmudi. 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Penerbit. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mahsun Mohamad, Firma, Sulistiyowati, Heribertus, Andre, Purwanugraha. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit BPFE. Yogyakarta.
- Mursyidi. 2009. *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Penerbit Refika Aditama, Bandung.
- Nordiawan Deddi, Ayuningtyas. 2010, *Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Saragai Brian. 2013. Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Minahasa Selatan. Unversitas Sam Ratulangi. Manado. *Jurnal EMBA* ISSN 2303-1174, Vol 1. Akses tgl 16 Oktober 2014. Hal.1171
- Syukriy. 2012. Penilaian Kinerja Keuangan Daerah . *Artikel*. <http://syukriy.wordpress.com/2011/11/29/penilaian-kinerja-keuangan-daerah/>. Diakses tgl 30 Juli 2014.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis. Cetakan ke Dua Belas*. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Pemerintah Republik indonesia. 2000. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000. *tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Pemerintah*. Jakarta.

FAKULTAS EKONOMI
DAN BISNIS